

**Tinjauan Eklesiologis Terhadap Penggunaan Leksionari dan  
Penggembalaan Khusus dan Kaitannya dengan Sistem Kepemimpinan  
yang Memperlengkapi dalam Tata Gereja dan Tata Laksana  
Gereja Kristen Indonesia**

Diajukan kepada Fakultas Theologia Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta  
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

**S K R I P S I**



Disusun oleh:  
Kristiani Setyaningsih Santoso  
01 04 1952

**UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA  
YOGYAKARTA  
2011**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**Tinjauan Eklesiologis Terhadap Penggunaan Leksionari dan  
Penggembalaan Khusus dan Kaitannya dengan Sistem Kepemimpinan  
yang Memperlengkapi dalam Tata Gereja dan Tata Laksana Gereja  
Kristen Indonesia**

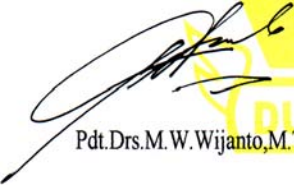
Oleh : Kristiani Setyaningsih Santoso / 01 04 1952

Telah Dipertahankan dalam ujian yang dilakukan oleh Dewan Dosen Penguji Fakultas  
Theologia Universitas Kristen Duta Wacana  
Pada Tanggal 24 Mei 2011

Disahkan oleh :

Dosen Pembimbing

Dekan Fakultas Theologia

  
Pdt. Drs. M.W. Wijanto, M.Th.

  
Pdt. Yusak Tridarmanto, M.Th.

Dewan Penguji :

- 1 Pdt. Drs. M.W. Wijanto, M.Th.
- 2 Pdt. Dr. Budyanto, M.Th.
- 3 Pdt. Handi Hadiwitanto, M.Th.



## **PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sesungguhnya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**Tinjauan Eklesiologis Terhadap Penggunaan Leksionari dan Pengembalaan Khusus dan Kaitannya dengan Sistem Kepemimpinan yang Memperlengkapi dalam Tata Gereja dan Tata Laksana Gereja Kristen Indonesia**

Benar-benar hasil karya sendiri. Pernyataan, ide, maupun kutipan baik langsung maupun yang bersumber dari tulisan atau ide orang lain dinyatakan secara tertulis dalam skripsi ini pada catatan perut/daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa saya melakukan plagiasi sebagian atau seluruh dari skripsi ini, maka gelar dan ijazah yang saya peroleh dinyatakan batal dan akan saya kembalikan kepada Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta.

Yogyakarta, 26 Mei 2011



Kristiani S. Santoso

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi dengan Judul:

**KEPEMIMPINAN YANG MEMPERLENGKAPI  
(Tinjauan Eklesiologis Atas Kepemimpinan Lingkup Sinode dalam  
Tata Gereja dan Tata Laksana Gereja Kristen Indonesia)**

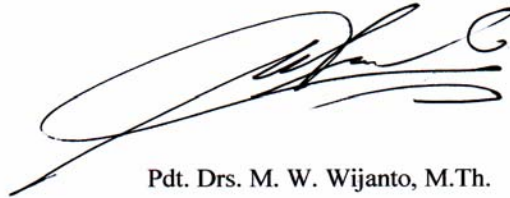
Disusun oleh:

Kristiani Setyaningsih Santoso

01 04 1952

Telah dinyatakan layak untuk diujikan dalam ujian skripsi  
di Fakultas Theologia Universitas Kristen Duta Wacana

Dosen Pembimbing,



Pdt. Drs. M. W. Wijanto, M.Th.

## **ABSTRAKSI**

Gereja merupakan persekutuan orang-orang percaya yang bertugas untuk melaksanakan misi Allah bagi dunia. Pelaksana utama misi tersebut adalah anggota gereja. Dari anggota gereja tersebut, dipilihlah beberapa orang untuk menduduki peran sebagai pejabat gerejawi. Hubungan antara anggota gereja dan pejabat gereja adalah setara dan meniadakan segala bentuk hierarki. Perbedaan di antara keduanya hanyalah pada peran yang dijalankan oleh masing-masing orang. Pejabat gereja bertugas memperlengkapi anggota jemaat agar dapat melaksanakan misinya.

## KATA PENGANTAR

Perjalanan studi dan penulisan skripsi bukanlah sekedar berbicara tentang kemampuan akademik dan intelektual. Setidaknya itulah yang dirasakan penulis. Bukan sekedar pencapaian nilai di atas kertas, tetapi kematangan berpikir. Bukan sekedar perolehan gelar, tetapi juga keteguhan hati. Oleh karena itu, penulis meyakini bahwa ada Tuhan dalam setiap proses hidup yang boleh dijalani. Dan sekarang, penulis dapat dengan lantang berkata, ***“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku ~Filipi 4:13.”***

Kekuatan-Nya hadir bukan dalam rupa pengalaman mistis spektakuler, melainkan melalui kehadiran orang-orang istimewa di sekitar penulis yang dengan sabar dan setia mendorong, serta menguatkan hingga skripsi ini boleh selesai dan dinyatakan lulus. Dan kini, dengan segala ketulusan hati penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Pdt. M.W. Wijanto, M.Th. beserta istri yang tidak hanya menjalankan perannya sebagai dosen pembimbing, tetapi juga sebagai orang tua dengan segala kesabaran dan kesempatan yang senantiasa diberikan. Terima kasih atas masa karantina di “Rumah Utara” dengan segala kenyamanannya.
2. Pdt. Dr. Budyanto, M.Th. dan Pdt. Handi Hadiwitanto, M.Th. selaku dosen penguji serta seluruh staf pengajar dan kantor Fakultas Theologia. Terima kasih untuk setiap ilmu, keramahan dan suasana kekeluargaan yang terjalin selama penulis menempuh studi di Fakultas Theologia.
3. Papi, Mami, Cicik, yang telah dengan sabar mendampingi proses hidup penulis. Terima kasih untuk kasih sayang yang tulus dan tak tergantikan.
4. Bpk. Hengky Soenaryo beserta keluarga, untuk semua nasehat, bimbingan dan teladan hidup yang luar biasa.
5. Pdt. Rinta K. Gunawan dan Sdri. Febe Oriana Hermanto, yang telah menjadi sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara.
6. Sdr. Ronald Henendra Oscar, yang bersedia menjadi pendamping dan pelampiasan dalam masa-masa sulit.

7. Rekan-rekan Guru Sekolah Minggu KA GKI Ngupasan, untuk setiap keceriaan, kesempatan belajar dan persaudaraan yang boleh terjalin.
8. Segenap jemaat dan Majelis Jemaat GKI Pekalongan yang telah membina iman penulis sejak kecil. Serta GKI Bintaro, GKI Peterongan, GKI Purbalingga yang telah menjadi tempat belajar dalam masa pra-stage, bantuan pelayanan, dan stage.
9. Rekan, sahabat, keluarga, kenalan yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu. Terima kasih untuk setiap doa yang tiada henti bagi penulis.

Terima kasih karena bersedia menjadi perpanjangan tangan Allah untuk menolong, menopang dan menguatkan penulis.

Yogyakarta, 26 Mei 2011

Kristiani S. Santoso

Penulis

## Daftar Isi

	Hal.
Halaman Judul .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Pernyataan Integritas Akademik .....	iii
Abstraksi .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	viii
Bab I Pendahuluan .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Permasalahan .....	3
1.3. Judul dan Alasan Pemilihannya .....	5
1.4. Batasan Permasalahan.....	6
1.5. Metode Penulisan .....	6
1.6. Sistematika Penulisan .....	7
Bab II Eklesiologi GKI : Uraian dan Analisa Atasnya .....	8
2.1. Keberadaan Gereja.....	8
2.1.1. Gereja Sebagai Karya Roh Kudus .....	8
2.1.2. Tujuan Keberadaan Gereja .....	10
2.2. Universalitas Gereja.....	13
2.2.1. Gereja Sebagai Penyataan dari Misi Allah .....	13
2.2.2. Misi Gereja: Persekutuan dengan Allah dan Sesama.....	14
2.2.3. Pelaku Misi: Anggota Gereja dan Pejabat Gerejawi.....	17
2.2.4. Pembangunan Gereja .....	19
2.3. Partikularitas Gereja.....	21
2.4. Eklesiologi “Meja Bundar” .....	25
Bab III Realisasi Kepemimpinan dalam Tata Laksana serta Analisa Atasnya ...	27
3.1. Sistem Presbiterial-Sinodal .....	27



3.1.1. Pandangan Calvin Mengenai Sistem Presbiterial-Sinodal dan Penerapannya dalam GKI Jateng .....	27
3.1.2. Pandangan GKI Mengenai Sistem Presbiterial-Sinodal .....	30
3.2. Realisasi Kepemimpinan dalam Tata Laksana .....	33
3.3. Analisa Kepemimpinan dalam Tata Laksana.....	36
3.3.1. Kepemimpinan yang Memperlengkapi .....	36
3.3.2. Kepemimpinan yang Menguasai.....	40
 Bab IV Penutup .....	 48
4.1. Kesimpulan .....	48
4.2. Saran .....	51

Daftar Pustaka

## Bab I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Gereja dipahami sebagai Tubuh Kristus, dan Kristus sendiri adalah Kepalanya. Itu berarti kuasa yang ada di dalam gereja adalah kuasa Kristus. Kekuasaan itu mutlak atas gereja melalui firman-Nya dan tidak dapat diwakili oleh siapapun. Pemimpin-pemimpin jemaat yang dipanggil adalah orang-orang yang hanya melayani Kristus dan misi yang ditugaskan kepadanya. Karena hanya ada satu kepala yaitu Kristus, maka gereja adalah juga satu adanya (gereja yang kudus dan am).

Gereja Kristen Indonesia di mana penyusun menjadi anggota jemaatnya merupakan bagian dari gereja-gereja di Indonesia yang juga turut melaksanakan misi Allah melalui wujudnya sebagai jemaat-jemaat, klasis-klasis, sinode wilayah- sinode wilayah, serta sinode<sup>1</sup>. Wujud ini tentunya juga dipahami sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, sebagai gereja Kristus. Dengan sistem pemerintahan presbiterial-sinodal yang merupakan warisan tradisi reformatoris – Calvinis<sup>2</sup>, maka sebenarnya sangat terbuka suatu ruang bagi jemaat untuk mengembangkan pemikiran dan menjadi jemaat yang mandiri.

Sebagai gereja yang terikat dengan tradisi Reformasi, khususnya Reformasi Calvinis, maka Gereja Kristen Indonesia, selanjutnya disebut GKI, perlu melihat kembali dasar yang diletakkan Calvin mengenai gereja. Gereja adalah persekutuan orang-orang yang telah diselamatkan berkat kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, yang telah dibenarkan meskipun tetap merupakan manusia berdosa.<sup>3</sup> Calvin melihat gereja sebagai sarana yang diberikan Allah kepada orang-orang percaya untuk membina dan memelihara dalam iman.<sup>4</sup> Dalam rangka itu, Allah menyediakan orang-orang yang diberi tugas untuk memberitakan firman dan melayankan sakramen, memimpin serta membina anggota gereja.

---

<sup>1</sup> lih. *Tata Gereja GKI* (Jakarta: BPMS GKI, 2009) p.21.

<sup>2</sup> Chris de Jonge, “*Ekklesiologi, Penataan Gereja dan Jabatan Gerejawi Menurut Yohanes Calvin*”, dalam *Penuntun – Buletin Gereja dan teologi* (Jakarta:GKI Sin.Wil. Jabar, 1995) p.245-248 .

<sup>3</sup> Jan S. Aritonang, *Berbagai Aliran di Dalam dan di Sekitar Gereja* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009) p.66-67.

<sup>4</sup> Christian de Jonge, *Apa itu Calvinisme?* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001) p.99.

Menurut Calvin, selain gereja wajib menjalankan fungsinya dalam hal pemberitaan firman dan pelayanan sakramen, di dalam gereja juga harus tercipta keteraturan. Untuk itulah perlu adanya tata gereja dan jabatan gerejawi<sup>5</sup>. Tradisi Calvin mengenai bentuk organisasi gereja memang membawa pengaruh terhadap cara-cara pengelolaan gereja, baik dari aspek manajemen gereja, aspek kepemimpinan serta kebijakan-kebijakan. Pengelolaan gereja serta kepemimpinan gereja pada akhirnya menjadi sorotan, apakah keberadaannya menolong jemaat bertemu Tuhan ataukah sebaliknya. Dari situlah muncul istilah *Presbyterian* yang mengacu pada sistem organisasi dan pemerintahan gereja di lingkungan gereja-gereja Calvinis. Sistem ini menekankan peran dan kekuasaan para *presbyter* (penatua yang dipilih dari antara warga jemaat, termasuk pendeta).

Kata presbiterial-sinodal adalah kata yang diambil dari bahasa Yunani πρεσβυτερος (baca: presbuteros) yang berarti tua-tua atau penatua, dan συν ὁδος (baca: sun hodos) yang berarti jalan bersama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan arah kebijakan gereja, pengambilan keputusan dilakukan oleh majelis jemaat untuk lingkup jemaat, majelis klasis untuk lingkup klasis dan majelis sinode untuk lingkup sinode, melalui persidangannya masing-masing.

Konsep presbiterial-sinodal yang dikemukakan oleh Calvin, berpandangan bahwa jemaat setempat, yang dipimpin oleh majelis jemaat, merupakan unit terkecil dalam gereja sebagai lembaga. Organisasi yang lebih luas didasarkan pada prinsip bahwa semua jemaat dan semua jabatan mempunyai status yang sama, sehingga tidak ada hierarki/jenjang. Jemaat di satu wilayah dihimpun dalam suatu sidang yang kemudian disebut klasis, sedangkan jemaat-jemaat di satu propinsi berbentuk suatu sinode propinsi.<sup>6</sup>

Tata gereja ini disebut presbiterial-sinodal karena semua keputusan jemaat diambil pada tingkat presbiterium (para penatua termasuk pendeta sebagai presbiter yang berkhotbah dan mengajar), sedangkan perkara-perkara yang menyangkut kesatuan organisasi gereja

---

<sup>5</sup> Empat jabatan gereja menurut Calvin: gembala atau pendeta, pengajar, penatua, dan diaken.

<sup>6</sup> Jan S. Aritonang, *Berbagai Aliran di Dalam dan di Sekitar Gereja* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009) p.70-71.

diputuskan pada tingkat sinode, yang dalam hal ini diikuti oleh wakil-wakil presbiterium dari setiap jemaat.<sup>7</sup> Lingkup yang lebih luas mengatur dan menetapkan hal-hal yang bersifat umum dan mendasar, seperti misalnya tata gereja dan konfesi. Intervensi klasis dan sinode sebagai lingkup yang lebih luas terhadap jemaat sebagai lingkup terkecil terjadi dalam kasus-kasus yang khusus. Dalam Tata Gereja GKI dikenal dengan istilah “perlawatan”. Dengan demikian, dalam konsep presbiterian tersebut tampak adanya penggabungan antara pola sentralistis dan pola otonomi jemaat. Ada hal-hal yang harus dipercayakan pada badan atau instansi di luar jemaat, tetapi jemaat setempat juga punya kewenangan dan kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri.

## 1.2. Rumusan Permasalahan

Dalam praktiknya, sistem ini tentu tidak seideal konsep awalnya. Terlebih lagi ketika gereja-gereja makin bertambah besar dan luas jangkauan pelayanannya, akan ada banyak persoalan yang muncul. Permasalahan tersebut misalnya, dari sisi jemaat setempat, mereka harus menjalankan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh persidangan sinode. Meskipun persidangan sinode diikuti oleh wakil-wakil jemaat setempat dan klasis, perlu disadari juga bahwa keputusan yang dihasilkan tidak bisa menjawab pergumulan yang terjadi pada aras lokal, yang sangat spesifik. Seringkali terjadi bahwa peraturan-peraturan yang telah dibuat tidak sesuai dengan kondisi dan situasi jemaat lokal. Dengan demikian seolah-olah terjadi pemaksaan peraturan-peraturan dalam pelaksanaannya.

Di GKI, Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) dapat menegur Majelis Jemaat karena tidak menjalankan peraturan yang telah ditetapkan, baik secara sengaja maupun tidak. Seperti yang terlihat dalam Tata Laksana bab XII pasal 37 poin 4 tentang pengembalaan khusus. Bagian tersebut menuliskan:

Pengembalaan khusus terhadap lembaga gerejawi dilaksanakan kepada Majelis Jemaat yang:

- a. mengambil keputusan dan/atau
  - b. melakukan praktik bergereja
- yang bertentangan dengan Firman Allah dan/atau Tata Gereja dan Tata Laksana dan/atau ajaran GKI dan/atau keputusan-keputusan dari Majelis Klasis dan/atau

---

<sup>7</sup> *Ibid*, p.71.

Majelis Sinode Wilayah dan/atau Majelis Sinode, ....dan menyebabkan meluasnya praktik bergereja yang tidak sesuai dengan Tata Gereja dan Tata Laksana GKI, agar Majelis Jemaat bertobat.

Pernyataan ini menyiratkan pemberlakuan mutlak Tata Gereja dan Tata Laksana GKI bagi setiap jemaat GKI. Hal ini menimbulkan kecenderungan dari jemaat setempat selalu meminta pertimbangan dari lingkup yang lebih luas dan menyebabkan jemaat setempat tidak pernah mandiri. Padahal jika kita menilik lebih jauh, konteks dan situasi di tiap jemaat tentu berbeda, kebutuhan masing-masing jemaat pun tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Peraturan dan keputusan yang dibuat juga terikat oleh ruang dan waktu yang senantiasa berubah.

Sebagai contoh, penggunaan leksionari dalam liturgi GKI untuk Kebaktian Minggu dan Kebaktian Hari Raya Gerejawi. Sudah sejak empat tahun terakhir GKI menggunakan leksionari dalam Kebaktian Minggu dan Kebaktian Hari Raya Gerejawi. Leksionari yang digunakan GKI diambil dari *The Revised Common Lectionary* yang tidak melewati proses adaptasi dengan konteks setempat. Karena merupakan hasil dari persidangan sinode, maka seluruh jemaat wajib melaksanakannya. Padahal leksionari yang digunakan belum tentu sesuai dengan konteks dan pergumulan setempat.

Dengan pemahaman bahwa gereja adalah sekumpulan orang yang dipanggil untuk melaksanakan misi Allah, maka seharusnya jemaat setempatlah yang menjadi titik berat utama dalam pengaturan hidup bergereja. Pola kepemimpinan yang ada seharusnya memperlengkapi jemaat dan bukannya “mendikte” setiap hal yang harus dilakukan jemaat sampai hal yang terkecil sekalipun. Tata gereja hendaknya memuat pedoman operasional dan bukannya detil peraturan-peraturan yang justru merusak kehidupan bergereja.

Keberadaan GKI yang semakin kompleks tentu menuntut adanya suatu kepemimpinan dan pengorganisasian agar dapat tercipta keteraturan dan ketertiban hidup bersama dalam menjalankan tugas dan panggilannya. Oleh sebab itu wujud konkret pengorganisasiannya haruslah senantiasa dimengerti terbatas sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan hidup bersama tersebut, dan bukan merupakan jati diri dari gereja itu sendiri.

Berdasarkan pengamatan penyusun, maka ada beberapa pertanyaan yang coba akan ditelusuri dalam skripsi ini: apa dan bagaimana pemahaman eklesiologis GKI mengenai gereja sebagai kesatuan tubuh Kristus yang harus memperlengkapi setiap anggotanya dalam rangka menjalankan misi Allah di dunia, sejauh mana pemahaman itu terwujud dalam peraturan-peraturan pada Tata Dasar dan Tata Laksana GKI.

### 1.3. Judul dan Alasan Pemilihannya

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka pembahasan lebih lanjut dalam skripsi ini diberi judul:

**Tinjauan Eklesiologis Terhadap Penggunaan Leksionari dan  
Penggembalaan Khusus dan Kaitannya dengan Sistem Kepemimpinan  
yang Memperlengkapi dalam Tata Gereja dan Tata Laksana Gereja  
Kristen Indonesia**

Pertimbangan penyusun memilih judul ini, adalah pertama judul ini mewakili isi skripsi. Kedua, penyusun merasa perlu mengangkat pembicaraan mengenai hal ini karena kepemimpinan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan gereja sebagai organisasi.

### 1.4. Batasan Permasalahan

Berdasar rumusan judul skripsi di atas, maka pada bagian ini perlu penyusun sampaikan beberapa penjelasan terkait dengan rumusan judul tersebut.

Kepemimpinan yang akan dibahas di sini bukanlah kepemimpinan individu atau pejabat gerejawi secara perseorangan (pendeta/penatua), melainkan pola atau fungsi kepemimpinan yang digunakan gereja untuk mengorganisir dirinya. Berbicara mengenai kepemimpinan gereja, maka mau tidak mau, pembicaraan tersebut akan menyentuh lingkup pembahasan eklesiologi GKI: apa itu gereja, konsep dasar pemahaman struktur

kepemimpinan presbiterial-sinodal dan bagaimana pemahaman tersebut menjadi dasar dalam implementasi kepemimpinan lingkup sinodal dengan jemaat sehingga pemahaman gereja sebagai tubuh Kristus yang satu dapat relevan dengan kehidupan bergereja di GKI.

Pembahasan ini akan melihat sejauh mana fungsi kepemimpinan dalam GKI memperlengkapi anggotanya untuk berperan serta menjalankan misi Allah. Pembahasan dan analisa kepemimpinan terbatas pada peraturan-peraturan yang tertulis pada Tata Dasar dan Tata Laksana dalam Tata Gereja GKI. Untuk itu, permasalahan yang akan dibahas terbatas pada dua hal yang menjadi sorotan utama yaitu:

1. Penggunaan leksionari dalam liturgi GKI

Pemberlakuan bacaan leksionari sebagai bacaan yang wajib digunakan dalam Kebaktian Minggu dan Kebaktian Hari Raya Gerejawi tentunya menimbulkan pro dan kontra di kalangan jemaat-jemaat GKI. Namun jemaat setempat tidak mampu berbuat banyak selain mengikuti apa yang sudah diputuskan dalam lingkup sinode.

2. Prosedur pelaksanaan penggembalaan khusus terhadap Majelis Jemaat

Seperti yang sudah disinggung di bagian awal, Majelis Jemaat dapat dikenakan status penggembalaan khusus apabila melakukan praktik bergereja yang tidak sesuai dengan Tata Gereja dan Tata Laksana dan/atau keputusan-keputusan dari Majelis Klasis dan/atau Majelis Sinode Wilayah dan/atau Majelis Sinode, ....dan menyebabkan meluasnya praktik bergereja yang tidak sesuai dengan Tata Gereja dan Tata Laksana GKI. Melalui hal ini akan dilihat adanya struktur yang hierarkis pada kepemimpinan dalam Tata Laksana GKI.

### 1.5. Metode Penyusunan

Dalam rangka membahas permasalahan yang telah penyusun ajukan di atas, maka metode yang akan digunakan adalah metode deskriptif-analitis, yakni:

1. Deskripsi eklesiologi yang tersirat dalam Mukadimah Tata Gereja GKI;
2. Deskripsi analisa kepemimpinan dalam Tata Dasar dan Tata Laksana sebagai perwujudan dari eklesiologi dalam Mukadimah Tata Gereja GKI melalui studi literatur atas Tata Gereja dan bacaan-bacaan terkait.

## 1.6. Sistematika Penulisan

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan, permasalahan, batasan permasalahan, alasan pemilihan judul, metode penyusunan dan sistematika penyusunan.

### BAB II EKLESIOLOGI GKI: Uraian dan Analisis Atasnya

Bab ini akan menguraikan penjelasan atas pemahaman GKI mengenai gereja secara universal dan mengenai dirinya secara partikular seperti yang tertuang dalam mukadimah Tata Gereja GKI.

### BAB III REALISASI KEPEMIMPINAN DALAM TATA LAKSANA SERTA ANALISA ATASNYA

Bab ini akan menguraikan tentang rumusan peraturan dasar dalam tata gereja sebagai penjabaran dari eklesiologi GKI terkait dengan kepemimpinan lingkup sinodal sebagai lingkup terluas dengan lingkup terkecil yaitu jemaat serta analisa untuk melihat sejauh mana kepemimpinan yang ada lebih bersifat memperlengkapi daripada hierarki.

### BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan jawaban atas permasalahan yang diungkapkan dalam pendahuluan. Dalam bab ini penyusun mencoba memberikan saran berkaitan dengan pembahasan yang telah diuraikan.



## Bab V

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Ekklesiologi merupakan suatu rumusan penghayatan teologis tentang siapa dan bagaimana gereja. Rumusan ekklesiologi memberikan identitas atau jati diri bagi gereja, sehingga berdasarkan jati diri itu gereja mempunyai arah dan tujuannya. Gereja Kristen Indonesia (GKI) merumuskan ekklesiologinya di dalam Mukadimah, dan menjabarkan ekklesiologinya tersebut berupa aturan-aturan yang tercantum di dalam Tata Dasar dan Tata Laksana. Aturan-aturan ini sejatinya berfungsi untuk menata tindakan-tindakan yang dilaksanakan demi mewujudkan panggilan dan tugas-tugas gereja.

Dari uraian skripsi ini, penyusun menyimpulkan pokok-pokok eklesiologi yang dipegang dan dipahami GKI seperti yang tersirat dalam Mukadimah Tata Gereja GKI, yaitu:

1. GKI memahami gereja sebagai pernyataan dari misi Allah. Gereja menjadi kepanjangan tangan Allah untuk melakukan karya penyelamatan-Nya bagi dunia. Oleh karena itu, setiap gerak langkah dalam kehidupan gereja harus senantiasa merujuk pada misi Allah. Allah sebagai Tuan dan gereja sebagai hamba yang melayani kehendak PemilikNya. Hanya jika gereja mengarahkan misinya pada dunia maka ia mengabdikan pada misi Allah.
2. Pelaku utama misi gereja adalah anggota jemaat. Di antara anggota jemaat itulah dipilih beberapa orang untuk menduduki fungsi khusus sebagai pejabat gerejawi. Oleh karena itu, hubungan antara anggota jemaat dan pejabat gerejawi adalah setara dan meniadakan segala bentuk hierarki. Sebagai pelaku misi, anggota jemaat perlu diperlengkapi agar mereka dapat menjalankan tugas panggilannya bagi dunia.
3. GKI saat ini terdiri dari empat lingkup jemaat, yaitu lingkup jemaat setempat sebagai lingkup terkecil, lingkup Klasis, lingkup Sinode Wilayah, dan lingkup Sinode sebagai lingkup terluas. Perbedaan dari masing-masing lingkup ini terletak pada luas cakupannya, dan bukan terletak pada tinggi-rendahnya. Pandangan terhadap keempat lingkup ini juga merupakan pandangan

eklesiologis. Artinya GKI sebagai persekutuan orang-orang beriman yang dipanggil dan diutus oleh Allah terdiri dari banyak jemaat, namun jemaat-jemaat ini merupakan satu kesatuan Tubuh Kristus. Karena keempat lingkup ini menjadi satu dalam ikatan Tubuh Kristus, maka sebenarnya tidak ada hak bagi lingkup-lingkup yang lebih luas untuk menempatkan lingkup yang lebih kecil pada posisi di bawahnya. Hal ini juga berlaku secara organisasi; GKI dalam bentuk organisasinya memiliki lembaga-lembaga gerejawi yang berfungsi sebagai pimpinan di empat lingkup jemaat tersebut. Majelis Jemaat sebagai lembaga gerejawi pada lingkup terkecil tidak diposisikan di posisi paling bawah, demikian juga Majelis Sinode sebagai lembaga gerejawi dengan lingkup terluas tidak dipandang sebagai lembaga gerejawi tertinggi yang berhak membawahi lembaga-lembaga gerejawi lain yang lingkungannya lebih kecil.

Penyusun melihat bahwa GKI dalam hal ini melalui BPMS GKI, telah memaknai eklesiologi yang dihayati melalui aturan-aturan yang ditetapkan dalam Tata Dasar. Namun menurut pandangan penyusun terdapat pula hal-hal yang ditetapkan di dalam Tata Laksana yang tidak merepresentasikan eklesiologi yang dihayati oleh GKI dalam Mukadimah. Hal-hal tersebut yaitu mengenai kepemimpinan.

Dalam rangka kepemimpinan, terjadi permasalahan orientasi pada institusi lebih kuat daripada memperlengkapi anggota jemaat. Hal ini terlihat misalnya dalam bentuk pengembalaan. Bentuk pengembalaan ini semula dipahami sebagai pelayanan yang dilakukan di dalam kasih terhadap anggota dan/atau pejabat gerejawi baik secara individual maupun komunal, serta terhadap lembaga gerejawi, untuk mendukung, membimbing, menilik, menegur, menyembuhkan, dan mendamaikan agar mereka hidup taat kepada Allah, dalam damai sejahtera Allah, sesama, dan seluruh ciptaan Allah. Akan tetapi hal ini bergeser dalam pengembalaan khusus menjadi kemutlakan pemberlakuan Tata Gereja.

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, penyusun menemukan dua penyebab utama terjadinya kerancuan dalam Tata Gereja dan Tata Laksana GKI, yaitu:

1. Pengutamakan keseragaman demi menunjukkan gerak bersama

Sebagai sebuah gereja yang luas jangkauan pelayanan serta wilayahnya, GKI perlu menerapkan sebuah sistem yang dapat menjaga dan memelihara kesatuan tiap bagiannya. Meskipun memiliki prinsip “keesaan dalam kepelbagaian”, namun GKI masih terjatuh pada keterpusatan yang mengarah pada keseragaman. Ini terlihat melalui kebijakan-kebijakan yang mengatur segala sesuatunya berlaku seragam, misalnya: penggunaan leksionari, tata liturgi, bahkan sampai pada pakaian liturgis pendeta.

Keseragaman bukanlah suatu hal yang buruk. Akan tetapi menjadi tidak tepat ketika potensi tiap bagiannya dikorbankan demi menampilkan hal-hal yang sebenarnya kurang esensial. Gerak bersama akan jauh terlihat melalui kepedulian antar tiap bagian dan keselarasan dalam menjalankan tugas panggilannya menyatakan misi Allah.

2. Pergeseran eklesiologi antara gereja yang hakiki dan gereja sebagai organisasi

Allah dalam kasih setia-Nya melibatkan manusia dalam karya penyelamatan-Nya. Karya penyelamatan itu telah dituntaskan dalam Yesus Kristus yang dalam pengimplementasian keselamatan itu melibatkan manusia-manusia yang dipanggil secara khusus untuk diutus memberitakan Injil Orang-orang inilah yang dibentuk menjadi persekutuan fungsional melalui kesaksian dan pelayanannya. Persekutuan ini kemudian menata kehidupannya menjadi institusional untuk menjalankan fungsinya, Hanya dalam perkembangannya institusi gereja menjadi lebih penting daripada fungsi yang diembannya. Terjadilah bermacam-macam bentuk institusi gereja. Fungsi gereja yang seharusnya menjalankan misi Allah menjadi sekunder karena gereja sibuk dengan pembenahan struktur organisasi

Gereja memang harus belajar dari dunia bagaimana ia harus membenahi dirinya agar dapat menjalankan fungsinya seoptimal mungkin. Namun fungsi gereja tidak boleh disubordinasikan di bawah organisasi gereja. Justru misi gereja yang seharusnya menentukan struktur organisasi gereja. Struktur organisasi hanya merupakan salah satu penopang bagi pelaksanaan misi gereja.

#### 4.2. Saran

Setelah penyusun melihat masalah kepemimpinan yang ada di GKI, kemudian menganalisisnya dengan dasar eklesiologis dalam Mukadimah Tata Gereja dan Tata Laksana GKI, maka penyusun mencoba menyumbangkan saran-saran berkaitan dengan masalah kepemimpinan ini. Dan penyusun berharap semoga saran-saran ini dapat bermanfaat. Saran-saran dari penyusun yakni :

- Peninjauan kembali Tata Gereja dan Tata Laksana GKI. Setiap peraturan yang ada harus mengacu pada upaya pelaksanaan misi Allah dan menolong serta memperlengkapi anggotanya untuk terlibat aktif sebagai pelaku misi. Segala bentuk peraturan yang hanya mementingkan bentuk organisasi dan keseragaman, terlebih yang menggeser hakikat dan peran gereja harus dihilangkan.
- Adanya sosialisasi yang jelas mengenai keputusan dan kebijakan sinode bagi seluruh jemaat sehingga jemaat tidak hanya sekedar menjalankan, tetapi ikut terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang terkait kepentingan bersama. Sosialisasi yang jelas dan terbuka dapat memampukan jemaat untuk ikut mempertimbangkan secara kritis setiap kebijakan yang hendak diambil.
- Masing-masing lingkup terfokus pada bidang pelayanannya. Jemaat mengurus setempat, klasis/sinwil/sinode mengurus hal-hal yang terkait kepentingan bersama dalam lingkungannya masing-masing. Untuk melakukannya, perlu adanya batasan yang jelas mengenai kewenangan masing-masing serta kemandirian menentukan arah dan kebijakan yang menyangkut lingkup pelayanannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Alkitab Terjemahan baru (TB) © LAI 1974, cet. 24 (Jakarta: LAI, 2004)

Abednego, B.A., dkk, "Perjalanan Penyatuan GKI", dalam Henky C. Wijaya, dkk (edt), *Jalan Menuju Keesaan* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996)

Abineno, J.L. Ch., *Garis-garis Besar Hukum Gereja*, Cet. 9 (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009)

Allen, Horace T. Jr., "Using The Consensus Lectionary: A Response", *Social Themes of The Christian Year* (Ed. Dieter T. Hessel, Philadelphia: The Geneva Press, 1983)

Aritonang, Jan. S., *Berbagai Aliran di Dalam dan di Sekitar Gereja* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009)

BPMS GKI, *Tata Gereja dan Tata Laksana GKI* (Jakarta: BPMS GKI, 2009)

\_\_\_\_\_*Akta Persidangan Majelis Sinode GKI XIV* (Jakarta: BPMS GKI, 2006)

Calvin, Yohanes, *Institutio Pengajaran Agama Kristen* (terj.) (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005)

Darmaputera, Eka, "*Menuju Teologi Kontekstual di Indonesia*", dalam *Konteks Berteologi di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1988)

Grumm, Christine, "In Search of a Round Table", dalam Musimbi R.A. Kanyoro (edt), *In Search of a Round Table: Gender, Theology and Church Leadership* (Geneva: WCC Publications, 1997)

Hadiwijono, H., *Iman Kristen*, Cet. 2 (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1979)

Jonge, Christian de, *Apa Itu Calvinisme* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001)

Moulton, Harold K., *The Analytical Greek Lexicon-Revised Edition* (Grand Rapids Michigan: Zondervan, 1978)

Russel, Letty M., *Church in The Round* (Louisville: John Knox Press, 1993)

Theissen, Gerd, *Gerakan Yesus, Sebuah Pemahaman Sosiologis Tentang Jemaat Kristen Perdana* (Maumere: Ledalero, 2005)

Widyapranawa, S.H (penyusun), *Benih yang Tumbuh* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1973)

## **B. Artikel**

Adiprasetya, Joas, *Memiliki Gereja Kristen Indonesia: Tinjauan Teologis atas Penyatuan GKI dalam Konteks Keberagaman Internal Kristen*, 2010, tidak diterbitkan